

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

A. Profil Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah



Gambar 4.1 menunjukkan lingkungan kantor instansi pemerintahan yang menjadi lokasi penelitian terkait implementasi pengelolaan arsip inaktif melalui penerapan SIKARDI

Sumber : website Badan Kesbangpol prov jateng

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, mengenai Pemerintahan Daerah, pada Oktober 2016 terjadi pengalihan isu status kepegawaian pada Bakesbangpol Jawa Tengah serta di tingkat kabupaten/kota menjadi pegawai Kementrian Dalam Negeri terhitung mulai Januari 2017, secara struktural Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah mulai diarahkan untuk beroperasi sebagai instansi dibawah kewenangan Kementrian Dalam Negeri. Namun demikian, pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menjadi landasan hukum proses vertikalisasi belum terealisasi. Kondisi tersebut berdampak pada status kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang tetap diposisikan sebagai perangkat daerah. Pada tahun 2017 instansi ini masih menerima alokasi pembiayaan yang sumbernya dari APBD.

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 terkait Organisasi Perangkat Daerah serta diresmikannya instruksi Menteri Dalam Negeri No 061/2911/SJ Tahun 2016 mengenai tindak lanjut atas peraturan tersebut turut memberikan kejelasan sementara terhadap kedudukan dan penerapan tugas Badan kesatuan Bangsa dan Politik. Ketentuan dalam pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 menegaskan bahwa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap menjalankan fungsi dan tugasnya hingga diterbitkannya aturan perundang-

undangan yang mengatur penerapan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya, sebagaimana dikelola dalam pasal 122 ayat (2) pembiayaan atas penerapan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik seperti yang dimaksud pada ketentuan sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hingga ditetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Sebagai tindak lanjut atas kondisi regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 mengenai Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Bab VII ketentuan lain-lain, Pasal 11 ayat (1) ditetapkan bahwa Bakesbangpol, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk sebagaimana dikelola dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 tetap menjalankan tugas dan fungsinya hingga ditetapkan aturan perundang-undangan yang mengatur penerapan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya, pada ayat (2) mengatur bahwasanya apabila perangkat daerah tersebut terintegrasi atau bergabung dengan urusan pemerintahan lainnya, pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dibatasi secara khusus pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Adapun pada ayat (3) menyatakan bahwa pembiayaan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah hingga dengan diberlakukannya ketentuan aturan perundang-undangan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Saat tahun 2017 terjadi perubahan identitas kelembagaan, di mana Bakesbangpol, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan jadi Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Seiring dengan perubahan tersebut, urusan Perlindungan Masyarakat tidak lagi berada dalam struktur kelembagaan badan tersebut, melainkan dialihkan dan digabungkan ke dalam Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.

Dapat disimpulkan bahwa, Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah ialah salah satu institusi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi dan tugas tertentu seperti yang disusun dalam ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bakesbangpol berperan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Gubernur dalam bidang kesatuan bangsa dan politik, ekonomi,

serta perlindungan rakyat. Dalam struktur pemerintahan daerah, lembaga tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melewati Sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2008 Pasal 20, menyatakan bahwasanya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam perumusan dan penerapan kebijakan daerah di bidang kesatuan politik dan bangsa. Tugas tersebut mencakup pelaksanaan pembinaan, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian tugas secara terpadu, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi yang meliputi pengelolaan program, keuangan, urusan umum, dan kepegawaian. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok itu, Badan Kesbangpol melaksanakan beberapa fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan kesatuan bangsa dan politik ;
2. Pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan serta layanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
3. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi tugas-tugas yang mencakup aspek kewaspadaan dan ideologi, ketahanan nasional, serta politik dalam negeri pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota ;
4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan ;

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian:
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahi :
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional;

4. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahi:
 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi. Penerapan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 2. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama serta Kemasyarakatan;
5. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Subbidang pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
 2. Subbidang Sistem, Penerapan dan Kelembagaan Politik;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Visi dan Misi

1. Visi

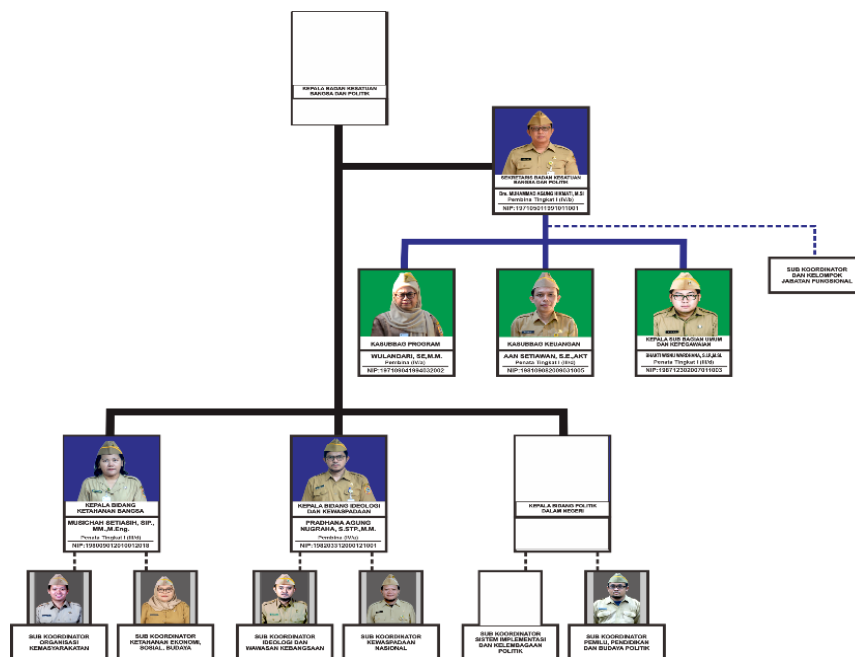
Terwujudnya Kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang demokratis, partisipatif dan kondusif

2. Misi

- a.) Menumbuhkan pemahaman, kesadaran, serta penerapan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b.) Mengembangkan kewaspadaan nasional melalui peningkatan keterlibatan masyarakat serta penguatan fungsi dan peran lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- c.) Meningkatkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat.
- d.) Menciptakan kondisi masyarakat yang stabil dan kondusif guna menunjang terwujudnya ketahanan nasional.
- e.) Mewujudkan peran lembaga penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik (<https://kesbangpol.jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>)

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah representasi visual yang menggambarkan susunan internal suatu lembaga atau organisasi dengan menjelaskan pembagian peran, tanggung jawab serta hubungan kerja antar individu didalamnya. Struktur organisasi juga menggambarkan sistem kewenangan sebagai pembagian jabatan dan tingkat pertanggung jawaban masing-masing posisi. Selain itu, struktur organisasi memuat kerangka hubungan antara fungsi, unit kerja maupun jabatan yang menggambarkan hierarki organisasi sebagai sarana pelaksanaan kewenangan, tanggung jawab serta mekanisme pelaporan kepada pimpinan. Keberadaan sruktur organisasi tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan organisasi, sehingga aktivitas kelembagaan tetap dapat berjalan meskipun terjadi pergantian personil, sekaligus memfasilitasi koordinasi hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal



Gambar 4.2 mengenai tentang bagan struktur organisasi dalam suatu instansi atau lembaga pemerintahan

Sumber : website badan kesbangpol jateng

Berdasarkan sumber dari *website Bakesbangpol Jawa Tengah*, struktur organisasi ini menggambarkan sistem kewenangan sebagai pembagian jabatan dan tingkat pertanggung jawaban masing-masing posisi. Selain itu, struktur organisasi memuat kerangka hubungan antara fungsi, unit kerja maupun jabatan yang menggambarkan hierarki organisasi sebagai sarana pelaksanaan kewenangan, tanggung jawab serta mekanisme pelaporan kepada pimpinan.

Keberadaan struktur organisasi tersebut berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan organisasi, sehingga aktivitas kelembagaan tetap dapat berjalan meskipun terjadi pergantian personil, sekaligus memfasilitasi koordinasi hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal.

Struktur organisasi Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Sekretaris Badan. Sekretaris Badan membawahi tiga subbagian, yakni Subbagian Keuangan, Subbagian Program, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya, dalam rangka penerapan tugas pokok dan fungsi kelembagaan, Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga bidang utama. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan membawahi Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta Subbidang Kewaspadaan Nasional. Bidang Ketahanan Bangsa mencakup Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, serta Subbidang Ketahanan Ekonomi. Adapun Bidang Politik Dalam Negeri membawahi Subbidang Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik serta Subbidang Pemilu, Pendidikan, dan Budaya Politik. Setiap sekretariat, subbagian, dan bidang tersebut memiliki tugas pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing sesuai dengan syarat yang berlaku.

A. Sekretariat

Sekretariat diketuai oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan. Sekretariat memiliki peran dalam menyiapkan rumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, mengoordinasikan tugas dengan terpadu, memberikan layanan administrasi, serta melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan bidang program, keuangan, kepegawaian, dan urusan umum. Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat membawahi tiga subbagian, ialah :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian ini memiliki tanggung jawab dalam penyediaan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian pelaksanaan tugas secara terpadu, pemberian layanan administrasi, serta penerapan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian. Ruang lingkup tanggung jawab tersebut meliputi urusan hukum, hubungan Masyarakat mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, pengelolaan rumah tangga, serta perlengkapan di lingkungan Bakesbangpol.

2. Sub Bagian Program

Sub bagian ini bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara terpadu, menyusun bahan sebagai dasar perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pemberian pelayanan administrasi, serta melaksanakan kegiatan di bidang program. Ruang lingkup kegiatan tersebut mencakup koordinasi perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta mengelola sistem informasi di lingkungan Bakesbangpol.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian ini memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelaksanaan pembinaan, pemberian pelayanan administrasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan. Cakupan tugas tersebut meliputi pengelolaan keuangan, proses verifikasi, pencatatan pembukuan, dan penyelenggaraan akuntansi di lingkungan Bakesbangpol.

B. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan bertugas menyiapkan bahan sebagai dasar perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, ideologi, dan kewaspadaan nasional. Dalam pelaksanaan fungsinya, bidang ini terdiri atas dua subbidang, yaitu:

1. Sub bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan

Sub bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan memiliki tanggung jawab dalam menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, penerapan pembinaan, serta penerapan tugas yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan bidang ideologi. Lingkup tugas tersebut mencakup fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi berbagai aktivitas, pengawasan, serta upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol. Selain itu, subbidang ini juga berperan dalam upaya perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi negara, internalisasi nilai-nilai sejarah bangsa, bela negara, serta pemberian penghargaan kebangsaan.

2. Sub bidang Kewaspadaan Nasional

Subbidang Kewaspadaan Nasional memiliki tugas untuk menyiapkan bahan sebagai dasar perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas yang berkaitan dengan sektor kewaspadaan nasional. Cakupan tugas tersebut mencakup pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, koordinasi berbagai kegiatan, serta upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol. Selain itu, subbidang ini berperan dalam perlindungan masyarakat yang mencakup kewaspadaan dini, kerja sama intelijen dan keamanan, pembinaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta pengawasan terhadap keberadaan orang asing dan lembaga asing.

C. Bidang Ketahanan Bangsa

Bidang Ketahanan Bangsa memiliki tugas menyiapkan bahan sebagai dasar perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan ketahanan seni dan budaya, agama, kemasyarakatan, serta ketahanan ekonomi. Dalam struktur pelaksanaannya, bidang ini terdiri atas dua subbidang, yaitu:

1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
Subbidang ini bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan untuk rumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan budaya dan seni, kemasyarakatan, dan agama. Ruang lingkup tugasnya mencakup fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi berbagai aktivitas, pengawasan, serta upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol. Selain itu, subbidang ini berperan dalam perlindungan masyarakat yang mencakup ketahanan budaya dan seni, kepercayaan dan agama, pembauran serta akulturasi budaya, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penanganan permasalahan sosial kemasyarakatan.

2. Subbidang Ketahanan Ekonomi

Subbidang ini berperan dalam menyiapkan bahan sebagai dasar perumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup kegiatan pelaksanaan, fasilitasi, pengawasan, koordinasi program kegiatan, serta upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol. Selain itu, subbidang ini berperan dalam perlindungan masyarakat yang berkaitan dengan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, serta aspek fiskal dan moneter, perilaku ekonomi masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan di bidang perekonomian.

D. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri bertugas menyiapkan bahan sebagai dasar rumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem penerapan dan kelembagaan politik, penyelenggaraan pemilihan umum, serta budaya politik dan pendidikan. Dalam struktur pelaksanaannya, bidang ini terdiri atas dua subbidang, ialah:

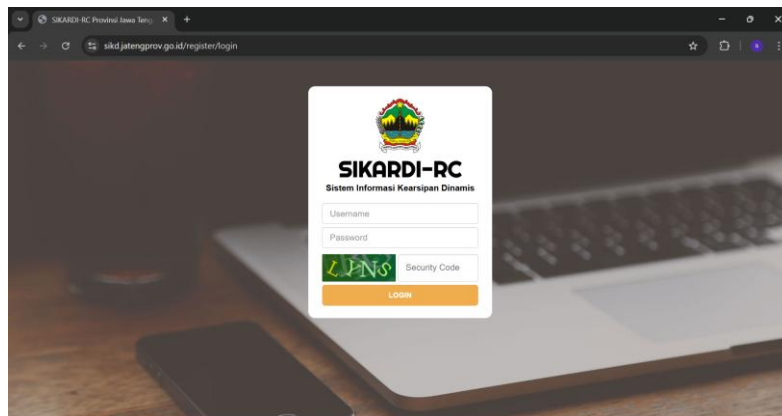
1. Subbidang Sistem, Implementasi, dan Kelembagaan Politik

Subbidang ini memiliki peran dalam menyiapkan bahan sebagai dasar rumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas di bidang sistem implementasi dan kelembagaan politik. Ruang lingkup pelaksanaannya mencakup upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol dalam aspek sistem dan penerapan politik, tata kelola pemerintahan, serta penguatan kelembagaan partai politik.

2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik

Subbidang ini berperan dalam menyiapkan bahan sebagai dasar rumusan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menjalankan tugas di bidang pemilihan umum, pendidikan politik, dan budaya politik. Ruang lingkup kegiatannya mencakup fasilitasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoordinasian berbagai kegiatan, serta upaya peningkatan kapasitas aparatur Bakesbangpol dalam aspek sistem dan implementasi pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, serta penguatan pendidikan dan budaya politik.

4.2 Gambaran umum penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah



*Gambar 4.3 Tampilan halaman login SIKARDI-RC
Sumber <https://SIKARDI.jatengprov.go.id/register/login>*

Penerapan SIKARDI di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung pengelolaan arsip inaktif yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Arsip inaktif merupakan arsip yang tingkat pemanfaatannya telah mengalami penurunan, namun masih memiliki nilai guna administratif, hukum maupun informatif sehingga keberadaannya perlu dikelola secara teratur, terencana dan sistematis. Dalam konteks pengelolaan arsip inaktif, SIKARDI berperan sebagai sarana pendukung dalam proses pendataan, pengklasifikasian, serta penemuan kembali arsip inaktif, arsip-arsip tersebut berasal dari berbagai kegiatan antara lain fasilitasi politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan nasional serta administrasi umum. Melalui SIKARDI, informasi mengenai arsip inaktif dicatat secara elektronik, sehingga keberadaannya dapat diketahui secara lebih jelas dan terkendali.

Secara umum, penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah sudah di implementasikan mulai tahun 2022. Pengelolaan arsip inaktif melalui sistem ini berpusat pada unit pengelola kearsipan yang bertugas melakukan input data arsip, mengelompokkan sesuai klasifikasi arsip, serta pemutakhiran informasi arsip, sementara itu pemindahan arsip dari masing-masing bidang masih memerlukan koordinasi dan penyesuaian prosedur kerja antar unit. Penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif memberikan manfaat dalam meningkatkan keteraturan arsip serta memudahkan

proses temu kembali arsip ketika diperlukan. Selain itu sistem ini membantu instansi dalam memantau jumlah, jenis serta status arsip yang dimiliki.

Berdasarkan Gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah telah berjalan sebagai bagian dari upaya modernisasi kearsipan. Namun dalam pelaksanaannya sistem ini masih memerlukan optimalisasi lebih lanjut terutama dalam hal konsistensi penggunaan sistem serta peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengelolaan arsip inaktif berbasis SIKARDI agar seluruh arsip inaktif dapat dikelola lebih efektif dan berkelanjutan.

4.3 Implementasi pengelolaan arsip inaktif melalui penerapan SIKARDI

Implementasi pengelolaan arsip inaktif melalui penerapan SIKARDI ialah salah satu upaya Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan tertib administrasi kearsipan serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan arsip dinamis. Di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, arsip yang telah melewati masa aktif nya secara administrasi dipindahkan dari masing-masing unit pengolah ke unit kearsipan untuk dikelola sebagai arsip inaktif yang sudah tercatat di SIKARDI.

Setelah dilakukan wawancara bersama Mas Dipta selaku Arsiparis Bakesbangpol arsip inaktif yang sudah diterima oleh unit kearsipan, Langkah selanjutnya adalah melakukan pendataan dan pencatatan arsip ke dalam SIKARDI proses pencatatan sistem ini mencakup penginputan isi informasi arsip seperti

- kurun waktu,
- kode pelaksana
- hasil,
- kode klasifikasi,
- isi informasi,
- nilai guna,
- media arsip yang di input,

- tingkat perkembangan,
- kondisi arsip serta
- lampiran

dengan di sistemkannya arsip inaktif kedalam SIKARDI, keberadaan arsip menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi secara elektronik. Dari sisi pengelolaan, penggunaan SIKARDI terhadap arsip inaktif yang telah dipindahkan memberikan kemudahan dalam pengendalian dan penelusuran arsip. Arsip yang

tersebar di masing-masing unit pengolah dapat terpantau secara terpusat di unit kearsipan, sehingga resiko kehilangan arsip dan ketidakteraturan penyimpanan arsip dapat diminimalkan. Selain itu SIKARDI memungkinkan pengelola arsip dapat memantau status retensi arsip yang menjadi dasar dalam perencanaan tindak lanjut pengelolaan arsip, seperti pemeliharaan atau penyusutan arsip.

4.4 Pemanfaatan dan Kinerja SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan SIKARDI memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan arsip inaktif. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan tahapan pencarian dan temu Kembali arsip dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan dengan metode pencarian arsip manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SIKARDI telah berfungsi sebagai sarana pendukung yang efektif dalam menyediakan informasi arsip yang dibutuhkan oleh instansi.

Selain meningkatkan efisiensi kerja, SIKARDI juga dinilai memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang cukup baik. Sebagian besar pengguna dapat mengoperasikan sistem tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan akan proses adaptasi dan pembiasaan bagi pegawai yang belum memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem informasi kearsipan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sumber daya manusia, khususnya pengalaman pengguna serta pemahaman dalam bidang kearsipan berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan SIKARDI.

Secara teknis, hasil wawancara mengungkapkan adanya keterbatasan dalam sistem ini terutama disebabkan karena sistem yang sering lambat, fitur

yang belum lengkap, serta kesalahan lainnya dalam sistem ini berdampak pada kelancaran penggunaan SIKARDI dan berpotensi menghambat proses pengelolaan arsip inaktif secara elektronik. Meskipun demikian, kendala teknis tersebut tidak sepenuhnya mengurangi peran dan manfaat SIKARDI, karena secara umum sistem ini tetap dinilai membantu dan memberikan nilai tambah dalam mendukung pengelolaan arsip inaktif.

Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sudah memberi manfaat nyata bagi instansi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas implementasi secara berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan pada aspek teknis sistem serta peningkatan kompetensi dan pembiasaan pengguna agar SIKARDI dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan konsisten

4.5 Kendala dalam implementasi pengelolaan arsip inaktif melalui penerapan SIKARDI

Dalam pelaksanaan SIKARDI, masih ditemukan sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat optimalisasi pengelolaan arsip inaktif. Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi khusus di bidang kearsipan dan penguasaan teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan SIKARDI dalam kegiatan pengelolaan arsip inaktif secara berkelanjutan.

Menurut keterangan Mas Dipta, tidak seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan maupun pelatihan kearsipan yang memadai. Akibatnya, kegiatan pengelolaan arsip inaktif melalui SIKARDI tidak dapat dilaksanakan secara rutin setiap hari, melainkan hanya pada periode tertentu dengan dukungan tenaga mahasiswa magang. Situasi tersebut menyebabkan masih terdapatnya jumlah arsip inaktif yang belum terdokumentasi dan diinput ke dalam SIKARDI, sehingga pengelolaan arsip inaktif belum sepenuhnya terintegrasi secara elektronik. Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala lain yang mempengaruhi penerapan SIKARDI adalah terbatasnya sarana pendukung. Ketersediaan perangkat komputer yang belum memadai serta

jaringan internet yang tidak selalu stabil menghambat kelancaran akses dan penggunaan sistem. Kendala teknis ini berdampak pada efisiensi proses pengelolaan arsip inaktif dan mengurangi intensitas pemanfaatan SIKARDI dalam kegiatan kearsipan sehari-hari.

Di samping faktor sumber daya dan infrastruktur, keterbatasan fitur dalam SIKARDI juga menghambat dalam pengelolaan arsip inaktif. Sistem belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengelolaan arsip secara elektronik, seperti belum tersedianya fitur *helpdesk* serta tanda tangan digital. Permasalahan lain yang muncul yaitu keterbatasan kapasitas penyimpanan, khususnya ketika terjadi pengunggahan dokumen secara berulang tanpa disadari, yang dalam jangka panjang menyebabkan beban server meningkat dan menurunkan kinerja sistem dengan cara keseluruhan. Selain itu, dari pengalaman penulis sistem ini masih harus melakukan navigasi secara manual untuk mengakses halaman tertentu. Kondisi ini mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas penggunaan sistem dalam mendukung pengelolaan arsip inaktif.

Secara keseluruhan, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif tak hanya bergantung pada keberadaan sistem, namun juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, serta kelengkapan fitur sistem. Oleh karena itu, diperlukan Upaya kompetensi aparatur, perbaikan infrastruktur serta pengembangan fitur SIKARDI agar pengelolaan arsip inaktif dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.6 Upaya mengatasi kendala implementasi SIKARDI

Upaya yang dijalankan oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi berbagai kendala penerapan SIKARDI menunjukkan adanya respon instansi terhadap permasalahan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan optimalisasi pemanfaatan sistem. Langkah-langkah yang diambil mencerminkan komitmen instansi dalam mewujudkan pengelolaan arsip inaktif yang lebih tertib dan berkelanjutan. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pemberian pendampingan dan arahan teknis kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman pegawai terhadap prosedur kearsipan serta penggunaan SIKARDI dalam kegiatan sehari-hari. Melalui pendekatan tersebut, instansi berupaya mengatasi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang sebelumnya menjadi kendala dalam pengelolaan arsip inaktif. Selain itu, pelaksanaan evaluasi secara berkala menjadi instrument penting untuk menilai sejauh mana penerapan SIKARDI telah berjalan sesuai dengan tujuan pengelolaan arsip inaktif. Evaluasi memungkinkan instansi untuk mengidentifikasi kendala teknis, kelemahan dalam pelaksanaan, serta kebutuhan pengembangan sistem dan peningkatan kapasitas pegawai. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, perbaikan dapat dilakukan secara terarah dan sistematis.

Pimpinan juga berperan melalui penetapan kebijakan, pemberian arahan yang jelas serta dukungan terkait pengelolaan arsip inaktif berbasis SIKARDI. Kebijakan yang tegas dan terstruktur memberikan landasan operasional bagi unit kearsipan dalam menerapkan SIKARDI secara konsisten. Dukungan yang diberikan oleh pimpinan dapat mendorong pegawai maupun arsiparis untuk lebih aktif dan konsisten dalam mengelola arsip inaktif melalui sistem. Arahan pimpinan berperan dalam menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaan arsip inaktif dapat dilakukan secara terkoordinasi dan tidak bersifat individual.

Dalam upaya pengembangan SIKARDI, koordinasi dengan Lembaga kearsipan menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan sistem. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan, dukungan anggaran, serta pengembangan fitur SIKARDI agar sesuai dengan kebutuhan pengelola arsip inaktif di tingkat daerah. Melalui koordinasi ini, kendala teknis dan keterbatasan sistem dapat diatasi secara lebih komprehensif. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi rutin mengenai pengembangan SIKARDI yang melibatkan Lembaga kearsipan mempunyai peran penting dalam menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pegawai maupun arsiparis terhadap pentingnya pengelolaan arsip inaktif berbasis sistem informasi. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu mengatasi kendala adaptasi pengguna, serta mengembangkan fitur di dalam SIKARDI yang masih terbatas.

Dengan demikian, pendampingan dan arahan teknis, evaluasi berkala, kebijakan dan arahan pimpinan, koordinasi dengan Lembaga kearsipan serta sosialisasi rutin merupakan upaya saling berkaitan dalam mengatasi kendala pengelolaan arsip inaktif melalui penerapan SIKARDI. Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIKARDI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, melainkan dukungan kepemimpinan dan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien.

4.7 Pembahasan hasil penelitian dikaitkan dengan kajian teori dan penelitian terdahulu

Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah secara konseptual sudah sejalan dengan teori pengelolaan arsip dinamis. Teori tersebut menegaskan bahwa arsip inaktif tetap memiliki nilai guna administratif, hukum, dan informatif sehingga memerlukan pengelolaan yang tertib, sistematis serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan kajian sistem informasi dan penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik implementasi di lapangan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menekankan bahwa penerapan sistem informasi kearsipan berbasis teknologi akan berjalan optimal apabila didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur serta komitmen kelembagaan yang kuat. Dalam beberapa studi terdahulu, penerapan sistem informasi digital digambarkan mampu meningkatkan kecepatan temu kembali arsip, ketertiban dalam administrasi serta pengendalian arsip inaktif secara lebih efektif.

Berbeda dengan temuan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIKARDI di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi berbagai gangguan non teknis yang berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan arsip inaktif. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kompetensi pegawai dalam pengoperasian SIKARDI, belum meratanya pemahaman pegawai terkait pentingnya pengelolaan arsip inaktif,

belum optimalnya evaluasi berjalannya SIKARDI serta perlu ditingkatkan koordinasi dengan Lembaga kearsipan daerah terkait evaluasi berjalannya SIKARDI. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan arsip apabila tidak diimbangi dengan penguatan aspek sumber daya manusia dan tata kelola organisasi. Dari sisi kajian teori implementasi kebijakan dan sistem informasi, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa faktor manusia dan organisasi memiliki peran dominan dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem, hal ini menjadi pembeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek teknis dan keunggulan sistem secara normatif. Penelitian ini justru menyoroti bahwa dalam konteks pengelolaan arsip inaktif, tantangan utama terletak pada proses adaptasi pegawai terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis digital.

Dengan demikian, perbandingan penelitian terletak pada fokus analisis. Penelitian terdahulu umumnya cenderung membahas pengelolaan arsip dinamis serta mengkaji penerapan sistem kearsipan dari sisi efektivitas teknologi dan prosedur, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan arsip inaktif serta mengungkap dinamika implementasi SIKARDI secara lebih kontekstual khususnya pada pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SIKARDI tidak hanya bergantung pada kesesuaian sistem dengan teori pengelolaan arsip dinamis, tetapi juga pada upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas pegawai, penguatan komitmen pimpinan, serta pembenahan koordinasi kelembagaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini melengkapi kajian teori dan penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa penerapan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif merupakan proses yang bersifat multidimensional. Tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, namun juga kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi yang konsisten agar tujuan pengelolaan arsip inaktif secara efektif, efisien, dan akuntabel dapat tercapai.

- a. Tabel 4.1 mengenai tentang perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan

No	Penelitian terdahulu	Fokus utama	Perbedaan dengan penelitian Terdahulu	Fokus penelitian yang dbahas
01	Ratna Anugraheni Putri & I Nyoman Suputra	Pengelolaan arsip inaktif elektronik melalui SIKARDI	Terbatas pada instansi Kearsipan	Mengkaji implementasi SIKARDI pada instansi non-kearsipan (Bakesbangpol Prov. Jateng)
02	Arifin Adi Prasetyo & Jazimatul Husna	Evaluasi SIKARDI pada proses temu kembali arsip	Fokus hanya pada satu fungsi sistem	Menganalisis pengelolaan arsip inaktif secara menyeluruh
03	Witanti Putri Anggreani dkk.	Penerapan SIKARDI dari sisi teknis	Menitikberatkan aspek Teknologi	Mengkaji faktor teknis dan non-teknis dalam implementasi SIKARDI
04	Sabilla Iksaningtyas & Rukiya	Pemanfaatan SIKARDI dalam arsip dinamis	Membahas arsip dinamis secara umum	Fokus khusus pada arsip inaktif
05	Riana Suprpto & Dedy Rahman Prehanto	Pengembangan sistem arsip dinamis	Fokus pada perancangan sistem	Fokus pada implementasi sistem yang telah berjalan

Tabel 4.1 mengenai tentang perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan

4.8 Implikasi penerapan SIKARDI terhadap pengelolaan arsip inaktif

Penerapan SIKARDI memberikan implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Salah satu implikasi utama adalah meningkatnya keteraturan administrasi kearsipan. Melalui pemanfaatan SIKARDI, pengelolaan arsip inaktif dilakukan secara lebih terstruktur karena setiap arsip terdokumentasi dalam sistem, dilengkapi dengan informasi klasifikasi, kurun waktu, serta status arsip. Kondisi ini mendukung terciptanya pengelolaan arsip yang lebih tertib dan terkendali dibandingkan dengan sistem manual.

Selanjutnya juga terlihat pada peningkatan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencarian dan penelusuran arsip inaktif. Keberadaan SIKARDI memungkinkan pegawai untuk mengakses informasi arsip secara digital tanpa harus melakukan pencarian fisik secara langsung. Hal tersebut berdampak pada efisiensi waktu dan tenaga, serta mengurangi risiko kesalahan atau kehilangan arsip, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administratif dan pengambilan keputusan.

Penerapan SIKARDI juga membawa implikasi terhadap perubahan pola kerja pegawai, sistem ini mendorong pergeseran dari pola kerja konvensional menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip inaktif. Pegawai dituntut untuk lebih adaptif terhadap penggunaan sistem, baik dalam proses pencatatan, penyimpanan, maupun pemantauan arsip. Perubahan pola kerja tersebut menunjukkan bahwa SIKARDI tak hanya berperan sebagai alat teknis, namun juga sebagai instrumen transformasi tata kelola kearsipan di lingkungan instansi.

Namun demikian, implikasi positif tersebut belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan faktor pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi sebagian pegawai dalam pengoperasian SIKARDI masih menjadi kendala dalam pemanfaatan sistem secara maksimal. Oleh karena itu, penerapan SIKARDI berimplikasi pada kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melewati pendampingan dan pelatihan secara

berkelanjutan agar pegawai mampu memanfaatkan sistem sesuai dengan prosedur kearsipan yang berlaku.

Selain aspek sumber daya manusia, penerapan SIKARDI juga berimplikasi pada pentingnya dukungan organisasi. Komitmen pimpinan, kejelasan kebijakan, serta koordinasi dengan Lembaga kearsipan daerah menjadi faktor penentu keberlanjutan penerapan sistem. Tanpa dukungan organisasi yang konsisten, pemanfaatan SIKARDI dalam pengelolaan arsip inaktif berpotensi berjalan tidak merata dan kurang optimal. Di samping faktor tersebut, aspek teknis juga menjadi faktor pemicu yang memengaruhi efektivitas penerapan SIKARDI. Keterbatasan fitur sistem yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengelolaan arsip inaktif, serta kinerja sistem yang cenderung lambat pada kondisi tertentu, berdampak pada rendahnya intensitas pemanfaatan sistem oleh pegawai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas teknis sistem turut berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi SIKARDI, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan agar dapat mendukung pengelolaan arsip inaktif secara efektif.

Secara umum, penerapan SIKARDI berimplikasi positif terhadap pengelolaan arsip inaktif di Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah, terutama dalam meningkatkan keteraturan administrasi, efisiensi pencarian arsip, dan budaya digital pola kerja pegawai. Namun, agar implikasi tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan dan menyeluruh, diperlukan penguatan kompetensi pegawai, evaluasi, koordinasi antar Lembaga kearsipan daerah, serta dukungan organisasi yang berkesinambungan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola kearsipan yang efektif dan akuntabel.